

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
 PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2026
 BULAN MEI DI OPD Ptl. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Rabu, 10 Juni 2026

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 40,51 %

b. Keuangan = 8.369.459.795 (39,49%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		39.860.000			14.714.500		
1	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	39.860.000	40,10	39,74	14.714.500	(0,36)	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		53.760.000			4.922.000		
1	Rakor Data PPPA dan Dalduk KB/Rakor Data Pilah Perempuan dan Anak Jawa Tengah	53.760.000	21,86	9,25	4.922.000	(12,61)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah ditunda karena menyesuaikan Rakor terkait data di Kemenpppa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		5.950.000			1.320.000		
1	Fasilitasi Pansus LKPJ Gubernur/Fasilitasi Rapat Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jawa Tengah/FGD Urusan PPPA Dalduk KB	5.950.000	27,73	22,18	1.320.000	(5,55)	pelaksanaan kegiatan ditunda menyesuaikan rakor data dari kemenPPPA

Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.844.000			578.000		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.844.000	12	8	578.000	(4)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		38.862.000			1.405.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	38.862.000	38,34	3,60	1.405.000	(34,74)	Menyesuaikan Kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.750.000			0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.000	21,06	16,66	0	(4,40)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		53.200.000			2.750.000		
1	Pemantauan dan Evaluasi PUG	40.800.000	26,06	19,94	2.750.000	(6,12)	untuk Pemantauan dan Evaluasi PUG kab/kota dilakukan menjelang verifikasi lapangan PPE (jadwal menunggu KemenPPPA)
2	Piloting Implementasi PUG	12.400.000	25	0	0	(25)	bulan Mei fokus pada persiapan dengan KemenPPPA dan pelatihan Fasilitator PUG, untuk dapat mempersiapkan piloting PUG di OPD
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi							
sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi		294.570.000			93.781.500		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	294.570.000	33,38	32,13	93.781.500	(1,25)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		45.046.000			3.200.000		
1	Peningkatan Kapasitas dan Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten/Kota	45.046.000	11,10	8,10	3.200.000	(3)	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		40.330.000			0		

1	Fasilitasi Peningkatan Tim Ketahanan Keluarga Provinsi dan Kabupaten/Kota	18.650.000	33	0	0	(33)	masih menyusun konsep kegiatan TPK2D Provinsi yang melibatkan anggota TPK2D dari OPD-OPD terkait
2	Pengembangan Kapasitas Petugas Penunjang Layanan Perempuan dan anak Kab/Kota	21.680.000	44	0	0	(44)	menyesuaikan dengan jadwal narasumber
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	6.300.000			3.200.000		
1	Fasilitasi Partisipasi Anak dalam Pemenuhan Hak Anak	6.300.000	50,80	25,40	3.200.000	(25,40)	menunggu e controlling bisa disesuaikan karena ada kesalahan penginputan target saat awal tahun
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	23.000.000			13.500.000		
1	Pelaksanaan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak	23.000.000	67,40	58,74	13.500.000	(8,66)	peserta pelaksanaan advokasi pencegahan KtA adalah ASN sehingga tidak menerima Uang harian peserta kegiatan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	13.586.000			5.727.000		
1	Pelaksanaan Pelatihan Disiplin Positif bagi Lembaga Pendidikan	13.586.000	66,24	42,15	5.727.000	(24,09)	pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan Kemenag Kab. Wonogiri dan tidak memberikan UH Peserta
	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	13.667.000			1.733.000		
1	Pelaksanaan Advokasi PANDU CINTA (Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak)	13.667.000	68,73	12,68	1.733.000	(56,05)	Kegiatan ditunda untuk kematangan materi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	31.458.000			11.449.000		

1	Peningkatan Kapasitas Kader TPK Dalam Mendukung Program Bangga Kencana di Kecamatan Berdaya	31.458.000	51,33	36,39	11.449.000	(14,94)	Pembuatan dan Pemasangan baliho yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2026 belum dilaksanakan karena menunggu peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di bulan Juni 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000			500.000		
1	Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan	3.500.000	28,58	14,29	500.000	(14,29)	kebutuhan menyesuaikan kebutuhan korban yang dilayani
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			0		
1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan	10.000.000	20	0	0	(20)	Belum ada kebutuhan pendampingan tenaga ahli
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :							
		19	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :							
		0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Rakor puspaga by Zoom (PHA);
2. Verifikasi KLA by zoom (PHA);
3. Ngopi Penak;
4. Rapat Rutin Forum Anak (PHA);
5. Bimtek SRA by Zoom (PHA);
6. Pelatihan ketrampilan bagi AMPK di LKSA (Lembaga Kesejahteraan sosial anak/panti) Demak (PA);
7. Â Pelatihan skrining kesehatan mental berkolaborasi dengan Dinkes (Puspaga);
8. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama LintasÂ Sektor Pencegahan Kekerasan/TPPO di Kab. Wonosobo (PP);
9. Pertemuan Bersama Mitra/Lembaga Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Surakarta (PP);
10. Dikpol 5 titik (KG);
11. Pesantren PENAK (BKOW) (KG);
12. PPEP Pelatihan tahap 2 (KG);
13. Pilloting implementasi PUG (KG);
14. Penyusunan RAD PUG (KG);
15. Safari Pelayanan KB di Kab. Kendal dan Kab. Boyolali (KB);
16. Persiapan Harganas dan Pemasangan Baliho (KIE);
17. Workshop kelembagaan UPPKA di Kab. Magelang (KS);
18. Penyiapan kehidupan Berkeluarga, Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi dan Keterampilan Hidup Berkeluarga di Kelompok PIK Remaja â via zoom (KS);
19. Rapat Penyusunan PJPk Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 (Dalduk);
20. Fasilitasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Salatiga (Dalduk);

21. Layanan korban perempuan dan anak (rutin) (UPTD);
22. Rapat Pengendalian Internal (rutin) (Program);
23. Kegiatan Bangkom Meeting (UK);
24. Pembinaan Kearsipan (UK)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Memperhatikan pencapaian target-target indikator dalam RPJMD 2025-2029;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Mei 2026, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Rabu, 10 Juni 2026

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



FAISA MUKTI SETIAWAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197109192003122004